
ANALISIS PENGARUH PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN UPAH MINIMUM PEKERJA TERHADAP JUMLAH KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009-2015

Ansori¹, Joko Priyono²

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya¹

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya²

jokopriyono@untag-sby.ac.id²

ABSTRAK

This research starts from the writer's observation on the amount of poverty in East Java Province from year to year which change, either the amount of poverty which tends to decrease or vice versa that is increase. The results of the study are, positive influence of employment absorption, and the positive influence of minimum wage of workers on the amount of poverty in East Java Province. In an effort to mendorong the decline in the number of poverty as part of the effort to prosper the community, the government needs to do equality of employment, especially in areas that have not reached by the government so that the absorption of labor can run maximally and the government also needs to conduct policies that progressive and systematic to the minimum wage of workers in order to reduce the number of poverty, especially in East Java Province

Keyword : Labor Absorption, Minimum Wage, and Poverty

1. PENDAHULUAN

Tenaga kerja merupakan salah satu modal atau faktor terpenting dalam proses produksi. Selain itu tenaga kerja juga dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam penciptaan suatu barang dan jasa untuk memenuhi permintaan konsumen serta kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dengan fenomena yang terjadi tersebut, maka pekerja menjadi pihak yang dirugikan, karena mereka bekerja dengan mendapatkan imbalan yang tidak sesuai, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya tidak akan cukup. Untuk melindungi hak dari pekerja maka pemerintah membuat kebijakan upah minimum. Kebijakan upah minimum

merupakan salah satu kebijakan ketenagakerjaan yang penting bagi suatu daerah termasuk Provinsi Jawa Timur.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan upah minimum memiliki tujuan untuk memberikan dampak positif kepada pekerja yaitu untuk meningkatkan taraf hidup pekerja, khususnya pada pekerja yang memiliki upah rendah. Namun, ketika upah minimum mengalami kenaikan sampai diatas tingkat keseimbangan, hal ini dimungkinkan justru dapat menurunkan permintaan tenaga kerja atau penyerapan tenaga kerja, sehingga akan terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja yang akan berdampak pada naiknya tingkat pengangguran dan dapat

menaikkan tingkat kemiskinan. Saat ini kemiskinan masih menjadi masalah yang kompleks bagi negara berkembang termasuk juga bagi Indonesia, sehingga masalah kemiskinan ini masih menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah. Permasalahan kemiskinan yang terjadi ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya pekerja yang menganggur atau tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran yang terjadi ini mengakibatkan seseorang tidak memperoleh pendapatan yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidupnya sehingga masih terdapat penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan atau dapat dikatakan tergolong miskin. Selain itu kemiskinan yang masih terjadi di semua daerah di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Timur. Ini disebabkan oleh rendahnya tingkat upah atau upah berada dibawah standar.

Tabel 1
Data Jumlah Kemiskinan, Penyerapan Tenaga Kerja dan Upah Minimum Pekerja di Jawa Timur dari Tahun 2009-2010

TAHUN	JKM (Orang)	PTK (Orang)	UMP (Rp)
2009	6.022.590	29.371.132	741.263
2010	5.529.300	19.527.051	796.921
2011	5.251.450	19.652.526	1.129.105
2012	4.992.750	20.238.054	1.323.456
2013	4.893.010	20.432.453	1.522.205
2014	4.748.420	20.149.998	1.574.956
2015	4.775.970	20.274.681	1.546.789

Sumber: Bps, diolah Penulis (2016).

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya menurun, jumlah penyerapan tenaga kerja

di Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya meningkat, dan upah minimum pekerja di Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya juga meningkat sehingga dapat dipastikan ada pengaruh signifikan antara penyerapan tenaga kerja, upah minimum pekerja dan jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menetapkan berbagai kebijakan melalui berbagai program untuk menekan jumlah kemiskinan. Ada dua cara yang dilakukan untuk penanggulangan dan pengentasan kemiskinan, yaitu mengurangi beban biaya bagi rumah tangga sangat miskin dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin serta hampir miskin. Untuk mengurangi beban biaya bagi rumah tangga sangat miskin pemerintah mengambil kebijakan dengan membantu biaya pendidikan, biaya kesehatan, bantuan langsung tunai, raskin serta infrastruktur seperti air bersih, jalan desa dan sebagainya. Guna meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin serta hampir miskin pemerintah melakukan pelatihan ekonomi produktif, usaha ekonomi, stimulan modal kerja/usaha (koperasi wanita), pasar desa, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui Teknologi Tepat Guna (BAPEMAS).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga (MT Rionga & Yoga Firdaus, 2007:2).

Menurut Payman J. Simanjuntak definisi tenaga kerja adalah;

Penduduk yang berusia antara 14 sampai 60 tahun adalah variabel dari tenaga kerja itu sedangkan orang-orang yang berusia dibawah 14 tahun digolongkan bukan sebagai tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja pun sifatnya terbatas karena tidak semua penduduk merupakan tenaga kerja, hanya penduduk yang telah mencapai usia minimumlah yang baru bisa dianggap sebagai tenaga kerja. Sedangkan untuk usia 14 tahun keatas (remaja) yang mempunyai pekerjaan tertentu dalam suatu kegiatan ekonomi dan mereka yang tidak bekerja, sebenarnya mereka tidak dihitung sebagai angkatan kerja karena mereka yang masih bersekolah, juga wanita yang mengurus rumah tangga /keadaan fisik tidak bekerja/tidak mencari pekerjaan tidak dikatakan sebagai angkatan kerja (Payman J. Simanjuntak, 1985).

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan penduduk yang berusia 10 tahun keatas lebih yang sudah tahu dan mengerti atau sudah bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, atau melakukan kegiatan ekonomi.

Sedangkan menurut pendapat Sumitro Djojohadikusumo (1987), mengenai arti tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. Oleh sebab itu mereka telah mencapai usia pensiun biasanya tetap masih harus kerja sehingga mereka tetap digolongkan sebagai tenaga kerja (Payaman Simanjuntak, 1998).

Penduduk usia kerja dikelompokkan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dikatakan tenaga kerja adalah penduduk yang termasuk usia kerja yang mempunyai pekerjaan, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan karena sedang sekolah, mengurus rumah tangga

serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya misal pensiunan, bukan angkatan kerja ini sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu kelompok ini sering dinamakan potensial *labor force* (Payaman Simanjuntak, 1998).

Pengertian Angkatan Kerja

Istilah angkatan kerja disini sama dengan penduduk yang aktif secara ekonomis. Angkatan kerja atau Labour Force dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu: a. Golongan yang bekerja, b. Golongan yang mengurus dan yang mencari pekerjaan

Jumlah total penduduk yang benar-benar ada “pada bursa/pasar tenaga kerja pada saat tertentu”, definisi ini mencakup mereka yang bekerja dan mereka yang mencari pekerjaan secara aktif. Jadi tidak termasuk di dalamnya mereka yang dapat dan bersedia bekerja, tetapi tidak bekerja dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan (Winardi, 1977).

Angkatan kerja yang menganggur dan sedang mencari pekerjaan adalah:

1. Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan,
2. Mereka yang pernah bekerja pada saat pencacahan sedang menganggur dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

3. Mereka yang bebas tugas dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lagi.

Golongan yang menganggur ini dapat dibedakan dalam pengangguran dan setelah pengangguran yaitu sebagai berikut: 1. Golongan pengangguran adalah orang yang sama sekali tidak mau bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. 2. Setengah pengangguran adalah mereka yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja dilihat dari segi jam kerja, produktivitas kerja, dan pendapatan.

Pengertian Bukan Angkatan Kerja

Menurut Kusumowidho bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, adalah bagian dari pada tenaga kerja yang sebenarnya tidak terlibat, atau tidak berusaha untuk terlibat dalam kegiatan yang produktif, yaitu kegiatan untuk memproduksi barang dan jasa (Kusumowidlo, 1981).

Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari:

1. Golongan sekolah, untuk mereka yang memiliki kegiatan hanya bersekolah saja.
2. Golongan yang mengurus rumah tangga tanpa sedikitpun mendapatkan upah.
3. Golongan penerimaan pendapatan, mereka ini tidak termasuk melakukan kegiatan tetapi mereka memperoleh penghasilan, misalnya pensiun, hasil persewaan, dan bunga simpanan.

4. Golongan lain-lain untuk mereka yang hidupnya hanya tergantung pada orang lain karena lanjut usia, lumpuh, dungu, dan sebagainya.

Pengertian Kesempatan Kerja

Kata “Employment” dalam bahasa Inggris berasal dari kata kerja “To Employ” yang berarti menggunakan suatu proses usaha untuk memberikan pekerjaan atau sumber penghidupan. Arti kata “Employment” dinyatakan dengan banyaknya jumlah orang yang dimaksudkan yaitu sejumlah orang yang ada dalam pekerjaan yang mempunyai pekerjaan.

Sedangkan menurut Sumitro Djojohadikusumo pengertian kesempatan kerja adalah Jumlah yang menunjukkan beberapa orang (tenaga kerja) yang telah dapat tertampung dalam suatu perusahaan atau instansi sebagai pekerja di dalamnya, atau pekerjaan di dalam instansi tersebut (Sumitro Djojohadikusumo, 1985:146).

Sedangkan menurut Suharsono Sagir yang dimaksud dengan kesempatan kerja adalah Suatu kondisi dinamis dimana seseorang penduduk dapat melakukan kegiatan untuk memperoleh imbal jasa ataupun suatu penghasil dalam jangka waktu tertentu (Suharsono Sagir, 1982:59).

Sedangkan menurut Suroto kesempatan kerja adalah Kesempatan kerja

ada 2 unsur, yaitu lapangan atau kesempatan kerja, dan orang yang dipekerjakan atau melakukan pekerjaan tersebut. Dengan demikian pergeseran employment sudah jelas yaitu kesempatan kerja yang menduduki dan atau jumlah orang yang mendudukinya (Suroto, 1992).

Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa, orang membeli barang karena barang itu member nikmat (*utility*) kepada si pembeli sementara pengusaha mempekerjakan seseorang karena membantu memproduksi barang atau jasa untuk di jual kepada konsumen. Oleh karena itu kenaikan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja tergantung pada kenaikan permintaan masyarakat akan barang yang di produksinya. Permintaan akan tenaga kerja seperti itu disebut *derived demand* (Payaman Simanjuntak, 1998).

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu, dimana keuntungan usaha yang didapat akan memberikan hasil yang maksimum. Secara umum permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh (Sony Sumarsono, 2003):

Perubahan tingkat upah

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi tingkat upah naik maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut: a. Naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan, selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit produksi. Biasanya konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membeli sama sekali (untuk barang sekunder dan terasier). Dalam jangka pendek kenaikan upah diantisipasi perusahaan dengan mengurangi produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja karena turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau *scale effect*. b. Kenaikan tingkat upah dalam jangka panjang akan direspon oleh perusahaan dengan penyesuaian terhadap input yang digunakan. Perusahaan akan menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan tenaga kerja dengan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Kondisi ini terjadi bila tingkat upah naik dengan asumsi harga barang-barang modal lainnya tetap.

Penurunan penggunaan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut efek substitusi tenaga kerja atau *substitution effect (capital intensive)*.

Perubahan permintaan hasil produksi oleh konsumen

Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.

Harga barang modal turun

Apabila harga barang modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada keadaan ini perusahaan akan cenderung meningkatkan produksi karena permintaan hasil produksi bertambah besar, akibatnya permintaan tenaga kerja meningkat pula. Ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara permintaan tenaga kerja dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya disebut elastisitas. Elastisitas mengukur besarnya perubahan permintaan terhadap perubahan faktor yang mempengaruhinya.

Penyerapan Tenaga Kerja

Ada perbedaan antara permintaan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang diminta atau dalam hal ini tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan atau suatu sektor. Permintaan tenaga kerja adalah keseluruhan hubungan antara berbagai tingkat upah dan jumlah orang yang diminta untuk dipekerjakan. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta lebih ditunjukkan kepada kuantitas atau banyaknya permintaan tenaga pada tingkat upah tertentu (Sadono Sukirno, 2004).

Penduduk yang terserap, tersebar di berbagai sektor yang memperkerjakan banyak orang umumnya menghasilkan barang dan jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. Demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja. Pertama, terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di masing-masing sektor. Kedua secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya dalam pendapatan nasional (Payaman Simanjuntak, 1998).

Menurut Umar Juoro, dalam bukunya masalah kedepan dalam pembangunan ekonomi Indonesia, memberikan pengertian bahwa yang dimaksud penyerapan tenaga kerja adalah:

“Sebagian jumlah orang yang telah tertampung dalam suatu perusahaan atau instansi-instansi” (Umar Juoro, 1985).

Dengan demikian berkembangnya cabang-cabang industri diharapkan mampu menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang luas dan tidak lepas dari upaya memantapkan pengembangan multi sektoral dalam proses pembangunan suatu wilayah secara keseluruhan dan makin meluas kesempatan kerja yang diciptakan oleh industri tersebut, akan menekan jumlah pengangguran yang setiap tahunnya menambah.

Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja merupakan hubungan antara tingkat upah dan jumlah satuan pekerja yang disetujui oleh pensupply untuk di tawarkan. Jumlah satuan pekerja yang ditawarkan tergantung pada (1) besarnya penduduk, (2) persentase penduduk yang memilih berada dalam angkatan kerja, (3) jam kerja yang ditawarkan oleh peserta angkatan kerja, di mana ketiga komponen tersebut tergantung pada tingkat upah (Payaman Simanjuntak, 1998).

Kenaikan tingkat upah mempengaruhi penyediaan tenaga kerja melalui dua daya yang saling berlawanan kenaikan tingkat upah disatu pihak meningkatkan pendapatan (*income effect*)

yang cenderung untuk mengurangi tenaga kerja. Dipihak lain peningkatan upah membuat waktu senggang (*substitution effect*). Daya substitusi ini akan meningkatkan jumlah tenaga tenaga kerja, tetapi setelah mencapai titik tertentu WB, pertambahan upah justru akan mengurangi waktu yang disediakan oleh keluarga untuk keperluan bekerja (S2, S3). Hal ini disebut *backward bending curve*, atau kurva penawaran yang membelok.

Pengertian Upah

Pengertian "UPAH" dalam UU 13/2003 Pasal 1 angka (30):

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut Permen no.1 Th. 1999 Pasal 1 ayat 1, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman,

ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.

Peraturan pelaksana terkait upah minimum diatur dalam Permenakertrans No. 01 Tahun 1999 tentang Upah minimum, Kepmenakertrans No. 226/MEN/2000 tentang perubahan beberapa pasal dalam Permenakertrans No 01 tahun 1999. Penetapan upah minimum dilakukan di tingkat propinsi atau di tingkat kabupaten/kotamadya, dimana Gubernur menetapkan besaran upah minimum propinsi (UMP) atau upah minimum Kabupaten/Kotamadya (UMK), berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan Provinsi atau Kab/Kota) dengan mempertimbangkan; kebutuhan hidup pekerja, indeks harga konsumen, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dsbnya.

Burt (1963) dalam bukunya berjudul "Labor Market, Unions and Government Policies" menyatakan bahwa ada beberapa teori yang menjelaskan proses penentuan upah dan faktor-faktor yang mempengaruhi upah pekerja, diantaranya:

1. Teori Kebutuhan Hidup (*Subsistence Theory*)

2. Teori Upah Besi
3. *Wage Fund Theory*
4. *Marginal Productivity Theory*

Kekakuan upah ini terjadinya sebagai akibat dari undang-undang upah minimum atau kekuatan monopoli serikat pekerja. Berbagai faktor tersebut berpotensi menjadikan upah tertahan di atas tingkat upah keseimbangan. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan pengangguran. Undang-undang upah minimum menetapkan tingkat upah minimal yang harus dibayar perusahaan kepada para karyawannya. Kebijakan upah minimum akan lebih banyak berdampak pada pengangguran dengan usia muda (Mankiw, 2007).

Menurut Samuelson (1997), peningkatan upah menimbulkan dua efek yang bertentangan atas penawaran tenaga kerja. Pertama efek substitusi yang mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih lama, karena upah yang diterimanya dari tiap jam kerja lebih tinggi. Kedua, Efek pendapatan mempengaruhi segi sebaliknya, yaitu tingginya upah menyebabkan pekerja ingin menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan lebih banyaknya komoditi yang dibeli. Pada suatu tingkat upah tertentu, kurva penawaran tenaga kerja akan berlekuk kebelakang (*backward bending curve*).

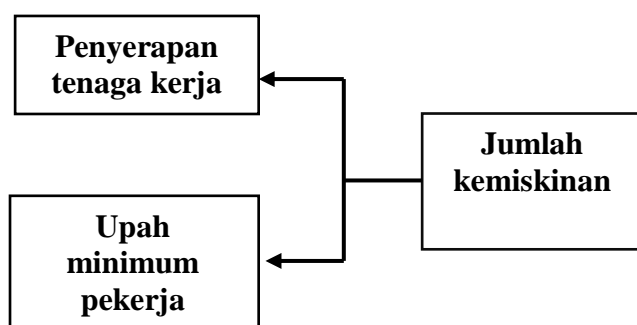
Menurut David Ricardo dan Adam Smith yang mengemukakan tentang teori upah alami atau sewajarnya, bahwa tinggi rendahnya tingkat upah ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu: a. Biaya hidup minimum pekerja dengan keluarganya, upah ini disebut upah alamiah atau upah kodrat. Menurutny, tinggi rendahnya biaya hidup ditentukan oleh tempat, waktu dan adat istiadat penduduk. b. Permintaan dan penawaran kerja, ini disebut upah pasar. Menurutny tinggi rendahnya upah pasar akan bergerak di sekitar upah kodrat.

Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut BPS (2012), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut Ravallion (2001) (dalam Arsyad, 2010) kemiskinan adalah “kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat”. Dari dua definisi di atas kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pangan, perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

3. Krangka Konseptual

Jumlah kemiskinan terjadi, salah satunya disebabkan oleh banyaknya pekerja yang menganggur atau tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran yang terjadi ini mengakibatkan seseorang tidak memperoleh pendapatan yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidupnya sehingga masih terdapat penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan atau dapat dikatakan tergolong miskin. Selain itu kemiskinan yang masih terjadi di semua daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Timur. Ini disebabkan oleh rendahnya tingkat upah atau upah berada dibawah standar. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan bagan berikut:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

4. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Analisis Pengaruh

Penyerapan Tenaga Kerja dan Upah minimum pekerja terhadap Jumlah Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015”. Dan yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini (1) adalah penyerapan tenaga kerja (X1), (2) Upah minimum pekerja (X2), sedangkan variabel terikat (Y) adalah Jumlah Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah orang dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur, tingkat upah minimum pekerja di Provinsi Jawa Timur serta data jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Jika ukuran populasinya diketahui dengan pasti, lebih baik diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi.

Sampel

Sebagian sampel yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap mewakili keseluruhan sampel. Batas kesalahan yang ditolelir ini untuk setiap sampel tidak sama, dan sampel yang digunakan adalah data dari tahun 2009-2015.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif yaitu penyajian data dalam bentuk jumlah, dan dituangkan untuk menerangkan suatu kejelasan dari angka-angka yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penyerapan tenaga kerja dan upah minimum pekerja terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti mengutip dari buku-buku, literatur, bacaan ilmiah, jurnal dan sebagainya yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Data sekunder ini berbentuk data runtut waktu (time series). Data yang dipilih adalah data pada kurun waktu tahun 2009-2015 dalam bentuk tahunan.

Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu upaya untuk memperoleh data dengan mempelajari dan menganalisis buku-buku literatur dan data-data olahan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan

bahan-bahan yang relevan dan akurat. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data studi secara dokumen yang berasal dari BPS Provinsi Jawa Timur, serta sumber-sumber kepustakaan lain yang terkait dengan penelitian ini.

Analisis Metode Regresi

Untuk melihat besarnya pengaruhantara penyerapan tenaga kerjadan upah minimum pekerja dengan jumlah kemiskinan yang diserap digunakan metode regresi sederhana. Adapun bentuk regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = jumlah kemiskinan (*Satuan Orang*)

a = konstanta

X₁= jumlah tenaga kerja yang terserap (*Satuan Orang*)

X₂= upah minimum pekerja (*Satuan Rupiah*)

b₁, b₂= slope, koefisien garis regresi.

e = variabel pengganggu / error

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

$$H_1: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \neq \beta_k$$

Tolak H₀ jika signifikansi < 0,05

k : Banyaknya variabel bebas

5.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Penelitian

Berikut ini data variabel penelitian dan data yang dapat diuraikan hasil analisis terhadap variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2
Deskripsi Variabel Penelitian

TAHUN	JKM (Orang)	PTK (Orang)	UMP (Rp)
2009	6.022.590	29.371.132	741.263
2010	5.529.300	19.527.051	796.921
2011	5.251.450	19.652.526	1.129.105
2012	4.992.750	20.238.054	1.323.456
2013	4.893.010	20.432.453	1.522.205
2014	4.748.420	20.149.998	1.574.956
2015	4.775.970	20.274.681	1.546.789

Sumber: Bps, diolah Penulis (2016).

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 rata-rata jumlah kemiskinan (JKM) sebesar 6.022.590, penyerapan tenaga kerja (PTK) sebesar 29.371.132 dan upah minimum pekerja (UMP) sebesar 741.263, pada tahun 2010 rata-rata jumlah kemiskinan (JKM) sebesar 5.529.300, penyerapan tenaga kerja (PTK) sebesar 19.527.051 dan upah minimum pekerja (UMP) sebesar 796.921, pada tahun 2011 rata-rata jumlah kemiskinan (JKM) sebesar 5.251.450, penyerapan tenaga kerja (PTK) sebesar 19.652.526, upah minimum pekerja (UMP) sebesar 1.129.105 sampai pada tahun 2015 rata-rata jumlah kemiskinan (JKM) sebesar 4.775.970, penyerapan tenaga kerja (PTK) sebesar 20.274.681 dan upah minimum pekerja (UMP) sebesar 1.546.789. Berikut adalah hasil analisis dari data diatas:

Tabel 3
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.997 ^a	.994	.991	45283.21777

a. Predictors: (Constant), UMP, PTK

Tabel 4
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.295E12	2	6.477E11	315.885	.000 ^a
	Residual	8.202E9	4	2.051E9		
	Total	1.304E12	6			

a. Predictors: (Constant), UMP, PTK

b. Dependent Variable: JKM

Tabel 5
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	5.535E6	187178.413		29.569	.000
	PTK	.043	.006	.324	6.853	.002
	UMP	-1.032	.062	-.783	-16.560	.000

a. Dependent Variable: JKM

b. Taraf nyata 5%

Pembahasan Hasil Penelitian

Analisa Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

Penyerapan Tenaga kerja merupakan faktor yang krusial karena berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, peningkatan penyerapan tenaga kerja menjadi prioritas utama untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Jika kita lihat

pada tabel 5 pada tahun 2009 ke 2010 penyerapan tenaga kerja yang menurun tidak mempengaruhi menurunnya kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, namun pada tahun 2010-2015 penyerapan tenaga kerja naik sehingga dapat dipastikan menurunnya jumlah kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus memperhatikan tentang penyerapan tenaga kerja karena merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi menurunnya jumlah kemiskinan jika pengangguran semakin banyak maka angka kemiskinan akan semakin meningkat. Membuka banyak lapangan pekerjaan sangat diperlukan dan dibutuhkan karena bisa menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu menekan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Analisis Pengaruh Upah Minimum Pekerja terhadap Jumlah Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

Upah minimum pekerja ini sendiri dapat kita lihat merupakan fenomena pembayaran atas kinerja perseorangan yang sangat minimum sekali dan bahkan cenderung tidak cukup dan ini terjadi di Provinsi Jawa Timur dimana banyak sekali dari tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur menerima upah minimum yang notabennya upah minimum ini telah disepakati oleh Pemerintah dan Pengusaha menjadi acuan untuk pembayaran kinerja

kepada para pekerja dimana hasil dari Upah akan habis dibagi 30 hari (1bulan).

Rata-rata upah minimum pekerja di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2009-2015 menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya terjadi kenaikan upah minimum pekerja di setiap daerahnya walaupun pada jumlah kenaikan yang berbeda-beda. Dari perhitungan ini dapat dilihat bahwa dengan adanya kenaikan upah minimum pekerja per tahun cukup menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan.

Bila melihat data yang ada dari tabel 5.1 dapat dilihat bahwa dari variabel yang ada menunjukkan bahwa seiring dengan naiknya upah minimum pekerja maka Jumlah kemiskinan akan menurun yang terjadi, dalam variabel ini dapat dijelaskan bahwa sebenarnya dengan banyaknya peningkatan pada upah minimum pekerja maka dapat dipastikan tingkat keinginan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan akan sangat besar, dimana itu akan menekan jumlah kemiskinan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dimana perusahaan tersebut mengikuti regulasi pemerintah dalam pengupahannya yang terlihat mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Interpretasi

Berdasarkan tabel 5.2 di atas diketahui bahwa, variabel penyerapan tenaga kerja dan upah minimum pekerja di Provinsi Jawa Timur memiliki koefisien positif dan memiliki hubungan yang signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tingkat keyakinan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa jika penyerapan tenaga kerja dan upah minimum pekerja tidak mendapatkan intervensi langsung dalam hal regulasi dan kebijakan dari pemerintah akan naiknya jumlah kemiskinan karena sangat signifikan pengaruhnya terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa upah minimum pekerja harus di perhatikan oleh pemerintah dan melakukan regulasi yang tepat karena dapat mempengaruhi jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dari upah minimum pekerja pemerintah harus memperhitungkan kebutuhan masyarakat sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, upah minimum pekerja juga dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja karena mampu meningkatkan minat dari masyarakat untuk bekerja, sehingga mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Hal ini bisa menjadi langkah acuan pemerintah dalam menekan jumlah

kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, dimana pemerintah dalam hal penyerapan tenaga kerja membuka lapangan kerja baru di setiap daerah khususnya di daerah-daerah yang minim lapangan pekerjaan dan menyesuaikan upah minimum pekerja sesuai kebutuhan dari masyarakat dan pada akhirnya mampu menekan jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

6. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian dan hasil penelitian serta hasil perhitungan pada Bab I sampai dengan Bab V, dimana sebelumnya hal-hal yang merupakan point dari kesimpulan satu per satu dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan rata-rata jumlah kemiskinan terus menurun pada tahun 2009 sebesar 6.022.590 orang hingga pada tahun 2015 sebesar 4.775.970 orang pekerja.
2. Perkembangan penyerapan tenaga kerja menurun pada tahun 2009 sebesar 29.371.132 orang ke tahun 2010 sebesar 19.527.051 orang dan meningkat dari tahun 2010 sebesar 19.527.051 orang hingga pada tahun 2015 sebesar 20.274.681 orang.
3. Rata-rata upah minimum pekerja di Provinsi Jawa Timur terus

meningkat pada tahun 2009 sebesar Rp. 741.263 hingga pada tahun 2015 sebesar Rp.1.546.789.

4. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang diperoleh maka hipotesis yang penulis ajukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari penyerapan tenaga kerja terhadap Jumlah kemiskinan, dengan terus meningkatnya penyerapan tenaga kerja maka akan terus menurun jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Upah minimum pekerja berperan positif terhadap Jumlah kemiskinan, dimana setiap tahunnya upah minimum pekerja mengalami kenaikan dan berdampak menekan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, perlu dilakukan beberapa usaha untuk tetap dapat menurunkan jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus memperhatikan tentang penyerapan tenaga kerja karena merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi menurunnya jumlah

kemiskinan jika pengangguran semakin banyak maka jumlah kemiskinan akan semakin meningkat. Membuka banyak lapangan pekerjaan sangat diperlukan dan dibutuhkan karena dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu menurunkan jumlah kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur.

2. Upah minimum pekerja yang tiap tahunnya meningkat harus dipertahankan oleh pemerintah supaya tingkat penyerapan tenaga kerja terus meningkat, namun untuk meningkatkan upah minimum pekerja pemerintah harus diperhitungkan juga keperluan kebutuhan hidup masyarakat selama kurun waktu satu bulan sehingga mampu mensejahterakan masyarakat di Provinsi Jawa Timur yang nantinya akan meningkatkan minat masyarakat untuk bekerja. Meningkatnya minat masyarakat untuk bekerja nantinya akan membuat penyerapan tenaga kerja semakin tinggi sehingga mampu menurunkan jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
3. Pentingnya peran pemerintah dalam menjaga tingkat penyerapan tenaga kerja, baik melalui

serangkaian kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan dunia kerja dan pemerataan lapangan pekerjaan kembali khususnya di daerah-daerah yang minim lapangan pekerjaan sehingga mampu menurunkan jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Arsyad. (2010). **Media Pembelajaran**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bintarto, R. 1989. **Buku Geografi Sosial**. Yogyakarta: UP Spring
- BPS, 2010. **Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2010**
- Burt (1963). **Labor Market, Unions and Government Policies**. Discussion Paper No. 1159.
- Deliarnov. 1995. **Pengantar Ekonomi Makro**. Jakarta: UI-Press.
- Drs. Sonny Sumarsono, 2003. **MM, Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenaga-kerjaan**. - Edisi Pertama – Yogyakarta; Penerbit Graha Ilmu.
- Jhon Stuart Mill, 1948. **Wage Fund Theory**. New York: Mc Graw Hill.
- Keputusan Menteri No.1 tahun 1999. Indonesia.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja no.16 tahun 2001. Indonesia.
- Kusumowidlo Sisajiatmo, 1981. **Dasar-dasar Demografi**, Cetakan Pertama, Penerbit Lembaga Demografi, FE UI, Jakarta.
- M.S, Amir. 2004. **Strategi Memasuki Pasar Ekspor**. Jakarta: PPM.
- Mankiw, 2008. **Marginal Productivity Teory**. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- MT Rionga & Yoga Firdaus, 2007:2. **Tenaga kerja**. Bandung: Alfabeta.
- Paul spicker (2002), **Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths**, A Catalyst Working Paper, London
- Payman J. Simanjutak, 1985. **Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia**, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Payman J. Simanjutak, 1998. **Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia**, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sadono Sukirno, 2004. **Teory Mikro Ekonomi**. Jakarta: Salemba Empat
- Sajogya, **Menuju Gizi Baik yang Merata di Pedesaan dan Kota**, Yogyakarta: UGM Press.1996
- Samuelson, **production possibility frontier = PPf**, 1996.
- Simanjuntak, Payaman. 2001. **Pengantar Ekonomi Sumberdaya**. Jakarta: FEUI.
- Soebroto, Thomas. 1979. **Pengantar Teknik Berusaha**. Semarang: EFFAR Co. I.tdSalemba Empat.Beberapa Potretnya di Indonesia. Jurnal
- Suharsono Sagir, 1982. **Kesempatan Kerja, Ketahanan Nasional, dan Pembangunan Manusia Seutuhnya**, Alumni Bandung, Bandung.
- Sumitro Djojohadikusumo, 1985. **Ekonomi Pembangunan**, Penerbit Pustaka Ekonomi, Jakarta.
- Suroto, 1992. **Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja**, Penerbit Gajahmada, Universitas Press, Yogyakarta.
- Umar Juoro, 1969. **Masalah Terdepan Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia**, Alumni Bandung, Bandung.
- Undang - Undang RI No. 14 Tahun1969. **Tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja**. Jakarta.

Undang - Undang RI no 13 pasal 1 angka 30 tahun 2003, tentang ketenaga kerjaan. Jakarta.

Winardi, 1977. **Kamus Ekonomi**, Penerbit Alumni Bandung, Bandung.

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/5314/>
Penyerapan-Tenaga-Kerja
MasihTinggi.

<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1489>

<https://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/245>

